Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

K.H. Noer Alie dan Kontra-Hegemoni Pendidikan Islam: *Leerplan* Lembaga Pendidikan Islam dalam Merespons UUPP No. 4 Tahun 1950

Ahmad Sirojuddin
Magister Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Ampel Surabaya
022418250003@student.uinsa.ac.id
Achmad Zuhdi DH
UIN Sunan Ampel Surabaya
zuhdidh@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji respons Lembaga Pendidikan Islam (LPI) terhadap kebijakan pendidikan nasional pasca-pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, dengan menempatkan K.H. Noer Alie sebagai salah satu aktor intelektual penting dalam pengembangan pendidikan Islam di Jakarta dan sekitarnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis *leerplan* LPI sebagai bentuk artikulasi gagasan pendidikan Islam serta strategi kelembagaan yang dikembangkan untuk mempertahankan otonomi pendidikan Islam. Penelitian menggunakan metode sejarah kritis melalui heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer meliputi dokumen *leerplan* LPI tahun 1950, notulensi Konferensi I LPI, serta arsip kelembagaan, yang dilengkapi dengan sumber sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leerplan* Sekolah Rakyat Islam (SRI) enam tahun memadukan pendidikan agama dengan pengetahuan umum dan pembelajaran bahasa, termasuk bahasa Inggris pada kelas VI, dengan beban belajar 30–42 jam per minggu. Selain merumuskan kurikulum alternatif, LPI membangun kemandirian pembiayaan melalui pembentukan perusahaan berbentuk *Naamloze Vennootschap* (N.V.) yang modalnya dihimpun dari anggota melalui kepemilikan andil. Strategi kurikuler dan ekonomi tersebut menunjukkan upaya LPI mempertahankan ruang otonomi pendidikan Islam di tengah pembentukan sistem pendidikan nasional. Dalam perspektif sejarah kritis, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk artikulasi alternatif terhadap arah kebijakan pendidikan negara pada awal era Demokrasi Liberal. K.H. Noer Alie dalam kiprahnya tersebut, tampil bukan hanya sebagai pengelola lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai aktor intelektual yang mengembangkan strategi kelembagaan untuk memperkuat keberlanjutan pendidikan Islam di tingkat lokal dan regional. Formasi pendidikannya yang tradisional, dari pengajian kampung dan pesantren Betawi hingga Mekah, selaras dengan muatan *leerplan* tersebut, meskipun penyusun dokumennya belum dapat dipastikan.

Kata Kunci: *K.H. Noer Alie; leerplan; pendidikan Islam; UUPP 1950; kontra-hegemoni.*

PENDAHULUAN

Awal tahun 1950 menjadi fase krusial bagi peletakan fondasi pendidikan nasional Indonesia. Setelah proses panjang sejak Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran dibentuk pada 1946, rancangan undang-undang pendidikan disahkan pada 2 April dan diundangkan pada 5 April 1950 sebagai Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 Tahun 1950 (Prabowo & Zulkarnain, 2016). Pembahasannya tidak sepi kontestasi. Rapat BP-KNIP memperdebatkan pendidikan agama, sekolah partikelir, dan tujuan pendidikan nasional. Rancangan Pasal 20 tidak menjadikan pelajaran agama di sekolah negeri sebagai mata pelajaran wajib, sehingga Nota Aceh menuntut agar pendidikan agama diwajibkan dan sekolah agama diakui setara sekolah pemerintah (Hidayat, 2018: 22). Sebelumnya, Nahdlatul Ulama, PB Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERTI), Persatuan Pelajar Islam (PII), Badan Kongres Muslimin Indonesia (BKMI), Majelis Syuro Muslimin (Masyumi) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bersama sejumlah organisasi lain menyatakan keberatan atas Kongres Pendidikan Antar Indonesia 1949 karena pelajaran agama tidak dimasukkan ke sekolah (Hidayat, 2018: 19–20). Rumusan akhir Pasal 20 ayat 1 mewajibkan sekolah negeri mengadakan pelajaran agama dan menyerahkan kepada wali murid untuk menetapkan keputusan apakah anaknya perlu mengikutinya atau tidak (Republik Indonesia, 1950). Secara normatif, undang-undang ini juga tidak berlaku bagi sekolah agama dan pendidikan masyarakat (Nasution, 2020: 521), dan Pasal 13–14 membuka ruang bagi sekolah partikelir yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi (Hidayat, 2018: 22). Meski teksnya relatif akomodatif, penilaian aktor Islam tidak berhenti pada pasal-pasal, yang dipersoalkan adalah pengakuan dan arah kurikulum nasional, yakni siapa yang memimpin makna pendidikan (Madinier, 2015).

Dalam konteks konstelasi perancangan kurikulum yang kian meningkat, sebelumnya sudah dibaca oleh K.H. Noer Alie, seorang ulama sekaligus eks-Komandan Markas Pusat Hizbullah-Sabilillah Djakarta Raya, bersama Mu'allim Rojiun Pekojan lantas mendeklarasikan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) di Jakarta pada 28 Desember 1949, sehari setelah penyerahan kedaulatan dalam Konferensi Meja Bundar. Tanggal itu disebut dalam riwayat singkat LPI yang diterangkan Hasjibuan pada Konferensi I (Ghazali, 1950). LPI lahir ketika rancangan undang-undang pendidikan masih diperdebatkan. Lembaga ini mengalihkan energi perjuangan fisik masyarakat koridor

Jakarta–Bekasi menjadi perjuangan di ruang kelas melalui penyusunan leerplan (rencana pelajaran) mandiri yang integratif (Anwar, 2015).

Menurut Anwar (2015: 138), kecintaan pada pendidikan membuat Noer Alie berinisiatif membentuk LPI, dengan K.H. Roji'un sebagai ketua urusan keluar dan Noer Alie sebagai ketua urusan ke dalam. Pilihan itu sejalan dengan sikapnya sebelumnya. Pada Agustus 1949 Wakil Residen Jakarta, Mohammad Moe'min, memintanya menerima jabatan Bupati Jatinegara. Noer Alie menolak karena teringat nasihat gurunya di Mekah, Syeikh Ali al-Maliki, agar tidak menjadi penghulu atau pegawai pemerintah, dan karena merasa urusan pemerintahan bukan bidangnya (Anwar, 2015: 138). Inisiatif itu bertumpu pada formasi tradisional yang panjang, mulai dari pengajian kampung dan pesantren Guru Marzuki di Klender hingga masa belajar di Mekah sejak 1934 (Zubaidah & Aripin, 2025), sehingga LPI dibaca di sini sebagai produk seorang ulama-intelektual dan bukan semata organisasi.

Konsolidasi LPI berlanjut dalam Konferensi Pertama LPI pada 11–14 Mei 1950, beberapa pekan setelah UUPP diundangkan. Sidangnya berpindah-pindah antara Jalan Matraman No. 28 Jatinegara, Pekojan No. 39, Gedung Kemidi Pasar Baru, dan Gedung DJKA Manggarai (Ghazali, 1950). Para utusan cabang, datang dari berbagai wilayah di sekitaran Jakarta, termasuk dari perwakilan cabang Cimahi, merespons UUPP yang baru diundangkan melalui sejumlah keputusan yang disahkan pada 13 Mei 1950. Statement LPI menilai penandatanganan undang-undang oleh Pemerintah Republik Indonesia itu sangat menyinggung perasaan umat Islam dan menyimpang dari dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. LPI memperkuat Statement Masyumi tanggal 23 April 1950 dan menyatakan bersedia memikul konsekuensi penolakan bersama organisasi Islam sampai undang-undang itu dicabut. Pada saat yang sama, LPI bertekad memperbanyak sekolah Islam, mengajak organisasi Islam menyatukan leerplan madrasah dan pesantren, dan mendesak pemerintah memberi subsidi. Konferensi juga menetapkan leerplan bagi jaringan Sekolah Rakyat Islam (SRI) dan mendirikan perusahaan berbentuk Naamloze Vennootschap (N.V.) yang modalnya dihimpun dari andil anggota, sebagai langkah kemandirian ekonomi agar operasional lembaga tidak bergantung pada pemerintah (Ghazali, 1950).

Historiografi pendidikan awal kemerdekaan sejauh ini baru memetakan dinamika Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) terutama dari kacamata kebijakan negara. Hidayat (2018) serta Prabowo dan Zulkarnain (2016) telah merekonstruksi tahapan penyusunan undang-undang tersebut, mulai dari Panitia

Penyelidik 1946, Kongres Pendidikan 1947 dan 1949, pembahasan di BP-KNIP, hingga perluasan berlakunya melalui UU No. 12 Tahun 1954, namun analisis keduanya masih terbatas pada tataran kebijakan makro pemerintah. Sementara itu, Nasution (2020) membaca Rencana Pelajaran 1947 murni sebagai produk kebijakan publik di bidang pendidikan. Kajian mengenai pendidikan Islam yang lebih luas, seperti yang dikerjakan oleh Steenbrink (1986) dan Maksum (1999), memang telah menelusuri bagaimana kedudukan pesantren dan madrasah dalam transisinya menuju sistem pendidikan modern. Di sisi lain, Emalia (2015) dan Madinier (2015) berhasil menunjukkan peran Partai Masyumi dalam memperjuangkan hak pendidikan agama dan alokasi subsidi bagi sekolah swasta keagamaan, tetapi analisis mereka masih sangat terpaku pada jalur perjuangan politik formal di parlemen. Adapun studi mendalam mengenai jaringan ulama Betawi (Derani, 2013; Dzikara, 2024) serta literatur biografi K.H. Noer Alie (Anwar, 2015; Syamsuri, 2023) umumnya menempatkan beliau dalam faset yang terpisah-pisah, yaitu sebagai ulama pejuang fisik, tokoh politik Masyumi, dai, atau pendiri Yayasan Attaqwa di Bekasi pada periode pasca-1950.

Dari pemetaan literatur tersebut, tampak sebuah celah krusial yang belum disentuh oleh para sejarawan, terutama dari sudut pandang sejarah intelektual. Respons umat Islam terhadap hegemoni kurikulum negara pasca-UUPP 1950 selama ini selalu dibaca sebagai gerakan politik partai, sedangkan gagasan orisinal K.H. Noer Alie sendiri kerap kali disempitkan hanya sebatas kiprah lokalnya dalam mendirikan pesantren di Bekasi. Oleh karena itu, kebaruan artikel ini terletak pada pergeseran sudut pandang analisis yang bertumpu pada sisi kajian intelektual (olah pikir) K.H. Noer Alie. LPI dan jaringan Sekolah Rakyat Islam (SRI) pada tahun 1949–1950 tidak boleh dilihat sekadar sebagai struktur badan kelembagaan yang berdiri sendiri, melainkan harus dibaca sebagai wadah taktis dan kendaraan perjuangan yang sengaja dibentuk oleh K.H. Noer Alie untuk mengaplikasikan ide, visi filosofis, dan gagasan pendidikannya. Melalui LPI, K.H. Noer Alie mengejawantahkan seluruh akumulasi formasi intelektualnya, mulai dari sensitivitas sosialnya di masa kecil, tradisi keilmuan rasional sewaktu berguru di Guru Marzuki, hingga wawasan kelas berjenjang dan ilmu politik yang ia serap di Mekah, ke dalam sebuah strategi kontra-hegemoni yang nyata. Dengan menempatkan K.H. Noer Alie sebagai subjek pemikir utama, artikel ini secara sistematis membedah bagaimana rancangan teknis kurikulum (leerplan) SRI dan skema finansial perusahaan saham N.V. yang bernaung di bawah LPI sebenarnya merupakan refleksi langsung dari buah pikiran

intelektual beliau yang visioner, mandiri, dan terencana dalam menghadapi intervensi kebijakan pendidikan negara.

Untuk membaca strategi itu, artikel ini meminjam kerangka Antonio Gramsci. Hegemoni dipahami sebagai kepemimpinan moral dan intelektual yang dibangun melalui persetujuan (consent) dalam institusi masyarakat sipil, termasuk sekolah, dan tidak semata melalui paksaan negara (Gramsci, 1971). Kontra-hegemoni ditempuh melalui "perang posisi" (war of position), yakni membangun institusi dan gagasan alternatif secara bertahap, bukan konfrontasi langsung. Gramsci (1971) juga menekankan bahwa kelompok sosial melahirkan intelektual organik yang merumuskan kesadaran kelompoknya dan mengorganisasi basis materialnya. Dengan kerangka ini, leerplan dibaca sebagai suprastruktur ideologis-kultural, N.V. sebagai basis material, dan Noer Alie sebagai intelektual organik yang mempertemukan keduanya dalam satu historic bloc. Kerangka ini memungkinkan analisis yang tidak hitam-putih, karena penolakan politis LPI berjalan beriringan dengan pembangunan institusi dan akomodasi terhadap standar nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas satu masalah pokok, bagaimana LPI di bawah gagasan K.H. Noer Alie merespons UUPP No. 4 Tahun 1950 sebagai strategi mempertahankan otonomi pendidikan Islam. Masalah itu diurai dalam tiga pertanyaan, diantaranya ialah: (1) bagaimana artikulasi dan karakteristik leerplan SRI enam tahun? (2) bagaimana LPI membangun kemandirian pembiayaan melalui N.V.? dan (3) bagaimana formasi intelektual dan peran Noer Alie sebagai aktor intelektual dalam menggerakkan strategi tersebut? Tujuannya menguraikan ketiga aspek itu secara kritis. Signifikansinya ada dua. Secara historiografis, artikel ini memperkaya pemahaman relasi agama, negara, dan otonomi pendidikan pada awal Demokrasi Liberal. Secara tematis, ia menggeser fokus dari elite politik partai ke praktik kelembagaan di tingkat lokal.

Penelitian ini memakai metode sejarah kritis dengan empat tahap (Kuntowijoyo, 2013). Pada tahap heuristik, sumber primer yang dikumpulkan adalah laporan Konferensi I LPI 1950 yang memuat Statement, Resolusi, AD/ART, leerplan, dan putusan ekonomi, dilengkapi sumber sekunder yang relevan. Kritik sumber dilakukan secara eksternal (keaslian dokumen) dan internal (kredibilitas isi, termasuk perbandingan dengan sumber sezaman). Interpretasi dilakukan melalui analisis-sintesis berdasarkan kerangka Gramsci, dan temuan disusun dalam historiografi yang analitis dan sistematis. Karena sumber biografis Noer Alie umumnya sekunder dan sebagian berasal dari lingkungan Yayasan

Attaqwa, klaim dalam artikel ini dibedakan menurut tingkat kepastiannya, yaitu terdokumentasi pada dokumen LPI, kesejajaran gagasan, atau dugaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Konferensi I LPI memuat *Statement*, Resolusi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, susunan pengurus, *leerplan* SRI, serta putusan tentang ekonomi dan media milik LPI (Ghazali, 1950). Rangkaian dokumen ini menunjukkan respons yang berlapis terhadap UUPP. Pada tataran wacana, *Statement* bernada penolakan politis. Pada tataran institusi, dokumen-dokumen lain bekerja membangun alternatif sambil tetap menuntut peran negara. Pembahasan berikut memisahkannya menjadi tiga bagian sesuai rumusan masalah. Ketiganya dibaca sebagai satu rangkaian antara wujud kurikuler, basis material, dan formasi intelektual yang menggerakkan keduanya.

Leerplan SRI enam tahun sebagai kurikulum tandingan

Dokumen *Leerplan (Rantjangan) Peladjaran "Sekolah Rakjat Islam"* memuat 16 mata pelajaran untuk enam tingkat kelas, dengan beban 30, 35, 39, 42, 42, dan 42 jam per minggu (Tabel 1). Kata *rantjangan* pada judulnya penting dicatat. Dokumen ini adalah rencana normatif, sehingga pembahasan berikut membaca gagasan kurikulum LPI, bukan bukti pelaksanaannya di kelas. Strukturnya enam tahun, sama dengan Sekolah Rakyat (SR) dalam Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950 (Nasution, 2020: 521).

No	Mata pelajaran	I	II	III	IV	V	VI
1	Aqa-id	2	2	2	2	2	2
2	Bahasa Indonesia	-	6	8	9	9	7
3	Bahasa Daerah	7	6	4	2	1	1
4	Bahasa Arab	-	-	3	4	5	5
5	Berhitung	6	6	8	7	7	8
6	Fiqih	2	2	3	2	3	3
7	Ilmu Bumi	-	-	-	2	2	2
8	Sedjarah	-	-	1	1	2	2
9	Menulis dan Membatja	4	4	3	2	1	1
10	Ilmu Hajat dan Kesehatan	-	-	-	3	3	3
11	Achlaq	2	2	2	2	2	1
12	Menggambar dan Pekerdjaan Tangan	2	2	2	1	1	1
13	Gerak Badan	3	3	2	2	2	2
14	Bernjanji	2	2	1	1	1	1
15	Djam Bebas	-	-	-	2	1	1
16	Bahasa Inggris	-	-	-	-	-	2
	Jumlah	**30**	**35**	**39**	**42**	**42**	**42**

Tabel 1: Struktur mata pelajaran dan jam pelajaran per minggu Sekolah Rakyat Islam (SRI) menurut *leerplan* LPI, 1950. Sumber: diolah dari Ghazali (1950: 31). Catatan: *cell* Sedjarah kelas III kurang jelas terbaca pada dokumen dan ditulis 1 agar sesuai dengan jumlah 39 jam.

Tabel 1 memperlihatkan tiga ciri. Pertama, rumpun keagamaan mendapat porsi besar dan tersebar sepanjang enam tahun. Aqa-id (2 jam), Fiqih (2–3 jam), Achlaq (1–2 jam), dan Bahasa Arab bersama-sama memakai 6 jam pada kelas I–II dan 10–12 jam pada kelas III–VI, atau sekitar 17–29 persen beban belajar. Pada SR menurut Rencana Pelajaran 1947, pendidikan agama hanya dua jam per minggu dan baru dimulai di kelas IV (Nasution, 2020: 522–523). Isinya praktis, Aqa-id berpusat pada rukun iman yang enam dan hal gaib seperti hari akhir. Fiqih melatih salat, puasa, sedikit tentang zakat dan haji, serta muamalah sehari-hari seperti meminjam, membeli, dan menemukan barang. Bahasa Arab dibatasi pada membaca bahasa yang sederhana sebagai pembuka kemungkinan belajar lebih lanjut, karena Al-Qur'an dan hadis berbahasa Arab (Ghazali, 1950: 22–23).

Kedua, pengetahuan umum tidak dikorbankan. Berhitung mendapat 6–8 jam per minggu sepanjang enam tahun dengan materi hitungan dagang (persen dalam jual beli, untung rugi, bruto, tara, netto), pengukuran, dan luas bangunan. Ilmu Bumi bergerak dari

tanah air terdekat ke seluruh Indonesia, memuat hasil pertanian, perikanan, dan industri, serta tempat penting di luar negeri seperti Mekah, Mesir, dan Amerika. Sedjarah memuat sejarah tanah air dan sejarah Islam sejak kelahiran hingga wafat Nabi. Ilmu Hajat dan Kesehatan, mulai kelas IV, mencakup tumbuhan dan hewan di sekitar murid, peredaran darah, serta pencegahan penyakit seperti disentri, cacar, malaria, dan kolera. Menulis dilakukan dalam huruf Latin dan Arab (Ghazali, 1950: 24).

Ketiga, bahasa disusun bertingkat. Bahasa daerah menjadi pintu masuk di kelas I (7 jam) lalu menyusut menjadi 1 jam di kelas V–VI. Bahasa Indonesia mulai di kelas II dan memuncak 9 jam di kelas IV–V. Bahasa Arab hadir dari kelas III dan naik menjadi 5 jam. Bahasa Inggris muncul 2 jam di kelas VI. Rencana Pelajaran 1947 untuk SR tidak memuat bahasa Arab dan Inggris, dan Bahasa Indonesia baru masuk di kelas III (Nasution, 2020: 523).

Komponen	**Jenis**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**
Jumlah jam per minggu	SR	28	28	35	38	40	41
	SRI	**30**	**35**	**39**	**42**	**42**	**42**
Pendidikan agama (SRI: Aqa-id dan Fiqih)	SR	-	-	-	2	2	2
	SRI	**4**	**4**	**5**	**4**	**5**	**5**
Budi pekerti (SRI: Achlak)	SR	1	1	2	2	2	3
	SRI	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**
Bahasa Indonesia	SR	-	-	8	8	8	8
	SRI	**-**	**6**	**8**	**9**	**9**	**7**
Bahasa daerah	SR	10	10	6	4	4	4
	SRI	**7**	**6**	**4**	**2**	**1**	**1**
Bahasa Arab	SR	-	-	-	-	-	-
	SRI	**-**	**-**	**3**	**4**	**5**	**5**
Bahasa Inggris	SR	-	-	-	-	-	-
	SRI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**
Berhitung	SR	6	6	7	7	7	7
	SRI	**6**	**6**	**8**	**7**	**7**	**8**
Ilmu bumi dan Sejarah	SR	-	-	1	2	4	4
	SRI	**-**	**-**	**1**	**3**	**4**	**4**
Ilmu hayat (SRI: Ilmu hajat dan kesehatan)	SR	-	-	-	2	2	2
	SRI	**-**	**-**	**-**	**3**	**3**	**3**
Menulis dan membaca	SR	4	4	3	3	-	-
	SRI	**4**	**4**	**3**	**2**	**1**	**1**

Komponen	Jenis	I	II	III	IV	V	VI
Gerak badan	SR	3	3	3	3	3	3
	SRI	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**

Tabel 2: Perbandingan jam pelajaran per minggu Sekolah Rakyat (SR) menurut Rencana Pelajaran 1947 dan SRI-LPI, 1950. Sumber: diolah dari Nasution (2020: 523) dan Ghazali (1950: 31).

Perbandingan pada Tabel 2 memperlihatkan pola yang konsisten. SRI memikul beban lebih berat di setiap kelas, dengan selisih 7 jam pada kelas II dan 1 jam pada kelas VI. Pada bidang yang menjadi inti kurikulum nasional, yakni Berhitung serta Ilmu Bumi dan Sejarah, SRI menyamai atau mendekati standar SR. Perbedaannya bertumpu pada tiga arah yaitu, muatan keagamaan lebih banyak (4–5 jam *Aqa-id* dan *Fiqih* pada kelas IV–VI berbanding 2 jam), bahasa daerah berkurang tajam (1 jam berbanding 4 jam pada kelas V–VI), dan dua bahasa tambahan (Arab dan Inggris). Satu catatan kritis perlu dibuat. *Leerplan* SRI tidak memuat Ilmu Alam yang pada SR 1947 muncul satu jam di kelas V–VI (Nasution, 2020: 523), sehingga unsur sains alam relatif lebih tipis daripada klaim integratifnya.

Perbandingan itu mengundang satu pertanyaan penilaian, yakni apakah bobot SRI masih berimbang bagi anak pada rentang kelas I–VI atau sudah terlalu berat. Pertanyaan ini dijawab dengan tiga indikator yang dapat dibaca dari dokumen, yaitu besaran jam terhadap acuan sezaman dan acuan kemudian, komposisi isi jam tersebut, serta laju kenaikan beban antarkelas (Tabel 3). Acuan kemudian yang dipakai adalah struktur Kurikulum 2013 SD/MI dengan 30, 32, 34, dan 36 jam pelajaran per minggu (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). Acuan ini hanya pembanding kasar, bukan ukuran yang dapat dibebankan kepada dokumen 1950.

Indikator	I	II	III	IV	V	VI
SRI-LPI 1950 (jam/minggu)	**30**	**35**	**39**	**42**	**42**	**42**
SR 1947 (jam/minggu)	28	28	35	38	40	41
Selisih SRI terhadap SR	+2	+7	+4	+4	+2	+1
Kurikulum 2013 SD/MI (JP/minggu)	30	32	34	36	36	36
Selisih SRI terhadap Kurikulum 2013	0	+3	+5	+6	+6	+6
Rumpun keagamaan (% jam SRI)	20	17	26	24	29	26
Seni, jasmani, bernyanyi, jam bebas (% jam SRI)	23	20	13	14	12	12
Jumlah bahasa yang dipelajari	1	2	3	3	3	4

Tabel 3: Indikator bobot belajar SRI-LPI dibandingkan SR 1947 dan Kurikulum 2013 SD/MI. Sumber: diolah dari Ghazali (1950: 31), Nasution (2020: 523), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014). Catatan: persentase dihitung dari jumlah jam SRI per kelas; kelompok seni dan jasmani mencakup Menggambar dan Pekerdjaan Tangan, Gerak Badan, Bernjanji, serta Djam Bebas; jam pada SRI dan SR belum tentu setara dengan jam pelajaran (JP) Kurikulum 2013 karena durasinya tidak tercantum pada tabel leerplan.

Empat pertimbangan menopang pembacaan bahwa *leerplan* SRI masih berimbang. Pertama, selisihnya terhadap SR 1947 moderat. Selama enam tahun SRI menambah 20 jam (230 berbanding 210 jam, sekitar 9,5 persen), dan selisih itu menyempit menjadi 1 jam pada kelas VI. Kedua, standar negara pada 1947 sendiri sudah padat bila diukur dengan acuan kemudian, sebab SR kelas VI memuat 41 jam sedangkan Kurikulum 2013 menetapkan 36 jam. Angka 42 jam pada SRI bisa disimpulkan lebih tepat dibaca sebagai kelanjutan kebiasaan zamannya daripada lompatan tersendiri. Ketiga, bebannya naik bertahap (30, 35, 39, lalu mendatar pada 42 jam sejak kelas IV-VI), dan kelas I setara dengan acuan kemudian. Keempat, isinya tidak menumpuk pada pelajaran kognitif. Menggambar dan Pekerdjaan Tangan, Gerak Badan, Bernjanji, dan Djam Bebas memakai 20–23 persen jam pada kelas I–II dan 12–14 persen pada kelas III–VI, sehingga porsi terbesarnya justru ada pada kelas awal. Muatan keagamaan pun tidak sepenuhnya menambah beban baru, karena *Achlaq* dirumuskan sebagai jiwa yang meresapi seluruh pelajaran (Ghazali, 1950: 24) dan Bahasa Arab dibatasi pada membaca sederhana (Ghazali, 1950: 22–23). Pengenalan bahasa juga berlapis, dari bahasa daerah di kelas I, Bahasa Indonesia di kelas II, Bahasa Arab di kelas III, hingga Bahasa Inggris dua jam di kelas VI, sementara jam bahasa daerah terus menyusut.

Pembacaan sebaliknya juga memiliki dasar. Pertama, kelas II menanggung

lonjakan relatif terbesar, yakni 35 jam berbanding 28 jam pada SR (sekitar 25 persen) dan 32 jam pada acuan Kurikulum 2013, bersamaan dengan masuknya Bahasa Indonesia enam jam dan rumpun keagamaan enam jam. Kedua, pada kelas IV–VI SRI melampaui acuan Kurikulum 2013 sebanyak 6 jam per minggu (sekitar 17 persen). Ketiga, beban bahasa menumpuk. Pada kelas III–VI sebanyak 15 jam per minggu, atau sekitar 36–39 persen waktu, terserap untuk bahasa, dan murid menulis dalam dua aksara, Latin dan Arab (Ghazali, 1950: 24). Keempat, kepadatan itu tidak disertai Ilmu Alam, sehingga tambahan jam tidak otomatis berarti cakupan pengetahuan umum yang lebih luas. Kelima, angka jam belum menentukan beban nyata. Tabel *leerplan* tidak menyebut durasi satu jam pelajaran maupun jumlah hari sekolah per minggu. Sebagai ilustrasi, bila satu jam setara 35 menit seperti pada acuan kemudian, 42 jam berarti sekitar 24,5 jam tatap muka per minggu, dan bila 40 menit menjadi sekitar 28 jam, dibandingkan 21 jam pada Kurikulum 2013 (36 jam × 35 menit).

Dengan menimbang kedua sisi itu, penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dari sumber yang ada bersifat bersyarat. Secara struktural, *leerplan* SRI dapat dikatakan padat tetapi masih berimbang untuk ukuran zamannya, karena selisihnya terhadap SR 1947 moderat, kenaikan bebannya bertahap, dan ruang aktivitas nonakademik tetap tersedia, terutama pada kelas awal. Titik rawannya ada pada kelas II dan pada beban bahasa kelas III–VI, yang bila diukur dengan acuan kemudian tergolong tinggi. Penilaian ini belum dapat ditingkatkan menjadi kesimpulan final karena diperlukan pelacakan lebih jauh tentang pengalaman murid, sebab dokumennya berupa rancangan dan tidak memuat durasi jam, jumlah hari sekolah, kesiapan guru, maupun capaian belajar. Dalam kerangka Gramsci (1971), bobot yang tinggi juga bekerja sebagai alat memperoleh persetujuan (*consent*) orang tua melalui klaim tidak tertinggal dari sekolah negeri. Rumusan tujuan pendidikan K.H. Noer Alie pada 30 tahun setelahnya, yakni 1980 menekankan pelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan daya tanggap murid serta tidak menumpuk materi hingga membuat murid putus asa (Zubaidah & Aripin, 2025: 89–90). Rumusan itu berjarak tiga dekade dari *leerplan* 1950, bukti tersebut dalam hal ini turut menunjukkan bahwa kepekaan terhadap beban murid ada dalam pemikiran Noer Alie.

Dalam kerangka Gramsci (1971), pola ini bukan penolakan atas kurikulum negara, melainkan “perang posisi” di dalam institusi masyarakat sipil. LPI mengambil kerangka nasional (enam tahun, Bahasa Indonesia, berhitung, ilmu bumi dan sejarah tanah air), menaikkan standarnya, lalu mengisi ruang yang tersisa dengan muatan Islam.

Dengan cara itu LPI mengejar persetujuan (*consent*) orang tua melalui tawaran yang tidak kalah dari sekolah negeri sekaligus memuat apa yang dianggap hilang di sana. Bahasa Inggris di kelas VI menjadi penanda yang jelas. Pada Rencana Pelajaran 1947, bahasa Inggris baru muncul di tingkat SMP (Nasution, 2020: 523), sehingga SRI menyatakan bahwa muridnya tidak tertinggal. Pola ini tampak berbeda dari nada *Statement* yang menolak undang-undang secara tegas. Perbedaan itu justru menjelaskan strategi LPI. Penolakan disuarakan di ruang politik, sedangkan pekerjaan sehari-hari dilakukan dengan membangun sekolah yang memenuhi standar.

Resolusi LPI menempatkan *leerplan* SRI dalam agenda yang lebih luas. Dokumen itu mencatat bahwa madrasah, pondok, dan pesantren belum memiliki keseragaman *leerplan* dari tingkat rendah sampai atas di seluruh Indonesia, lalu mengajak organisasi Islam mempersatukannya. Anggaran Rumah Tangga kemudian mewajibkan Badan Pekerja Majelis *Islah* menyusun *leerplan* pelajaran bertingkat tinggi (Ghazali, 1950). SRI dengan begitu menjadi anak tangga pertama dari tangga kurikulum Islam, bukan hanya jawaban atas UUPP. Fungsi ganda ini penting, sebab *Leerplan* itu menandingi kurikulum negara sekaligus menyeragamkan pendidikan Islam yang terserak. Dalam bahasa Gramsci, ia membangun kohesi di dalam blok sosial sebelum bernegosiasi dengan negara (Gramsci, 1971).

Sifat kontra-hegemonik *leerplan* paling terang pada rumusan Achlak. Seluruh pelajaran dan gerak-gerik guru dipandang sebagai pelajaran achlak, dan rasa keagamaan ditanamkan dalam semua mata pelajaran (Ghazali, 1950: 24). Muatan nilai Islam dipandang flesibel tidak diperlakukan sebagai satu mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi sebagai jiwa yang meresapi seluruh proses belajar. Yang diperebutkan bukan hanya jam pelajaran, melainkan kepemimpinan moral atas proses belajar itu. Rumusan tujuan pun menunjukkan pergeseran penekanan. *Aqa-id* bertujuan menanamkan cinta, rasa kebesaran, dan ketaatan kepada Tuhan menurut syariat, sedangkan Pasal 3 UUPP menekankan manusia berbudi pekerti yang cakap dan warga negara yang demokratis (Nasution, 2020: 521). Keduanya tidak saling meniadakan, tetapi urutan prioritasnya berbeda. Oleh karena itu, *leerplan* SRI bekerja sebagai kurikulum tandingan yang akomodatif. Lembaga Islam dapat menyamai bahkan melampaui standar nasional dalam jam dan bahasa tanpa kehilangan jati diri keislamannya.

Naamloze Vennootschap dan kemandirian pembiayaan LPI

Lembaga Pendidikan Islam (LPI) menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun kemandirian ekonomi organisasi. Melalui "Putusan mengenai Soal Perekonomian" dalam Konferensi I LPI pada 13 Mei 1950, lembaga ini memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan berbentuk Naamloze Vennootschap (N.V.) atau Perseroan Terbatas. Modal perusahaan ini sepenuhnya berasal dari iuran gotong royong anggotanya, di mana setiap lembar saham (andil) dijual seharga f 5 (lima rupiah) dengan batas maksimal pembelian lima lembar saham per anggota (Ghazali, 1950: 32). Pembatasan ini merupakan langkah strategis yang sangat penting. Dengan membatasi kepemilikan maksimal sebesar f 25 per orang, LPI berhasil mencegah dominasi atau kendali modal oleh segelintir orang kaya, sekaligus memastikan bahwa perusahaan ini benar-benar menjadi milik kolektif seluruh anggota. Kendali operasional perusahaan juga tetap dipegang erat oleh organisasi, di mana Dewan Pimpinan Umum bertugas mengatur pelaksanaan dan mengesahkan para pengelola ekonomi yang ditunjuk, yaitu M. Junus dan M. Hasjibuan (Ghazali, 1950: 32). Langkah bisnis ini diambil agar operasional LPI memiliki pembiayaan yang mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah (Ghazali, 1950).

Selain melalui sektor bisnis, LPI juga merancang sistem pendanaan internal yang terstruktur untuk menjaga keberlangsungan organisasi. Anggaran Dasar menegaskan bahwa pendanaan lembaga pada dasarnya bertumpu dari iuran dan sumbangan umat Islam (Pasal XIII). Secara lebih spesifik, Anggaran Rumah Tangga memisahkan pengelolaan dana untuk Majelis Islah (badan yang berisi ulama dan cendekiawan) dengan mewajibkan pembiayaannya bersumber dari Baitul Mal (Ghazali, 1950). Pemisahan anggaran ini memiliki tujuan yang sangat mendasar, yaitu menjaga independensi pertimbangan dan fatwa keagamaan para ulama agar tidak diintervensi oleh kepentingan eksekutif atau pengurus harian lembaga. Melalui regulasi ini, para ulama di dalam Majelis Islah dapat bekerja secara objektif tanpa dibayangi oleh masalah anggaran operasional organisasi.

LPI juga menyadari pentingnya memiliki media komunikasi sendiri untuk menyebarkan ide-ide mereka ke masyarakat luas. Meskipun baru berdiri selama dua bulan, bagian penerangan LPI telah menerbitkan majalah Sji'ar Islam serta surat kabar Petundjuk atau Al-Huda untuk dibaca oleh masyarakat umum, di samping melakukan

dakwah langsung di kampung-kampung dan tempat ibadah (Ghazali, 1950). Ketika media-media cetak tersebut mengalami kesulitan akibat kelangkaan kertas dan modal, konferensi langsung mengambil tindakan tegas dengan mewajibkan setiap anggota memberikan bantuan dana minimal f 1 untuk mendukung penerbitan (Ghazali, 1950: 33). Dana yang terkumpul kemudian dibagi dengan porsi yang jelas, yaitu 0,10 untuk tingkat ranting, 0,25 untuk tingkat cabang, dan porsi terbesar sebesar 0,65 langsung disetor ke pusat (Ghazali, 1950: 33). Alokasi dana yang berpusat hingga 65 persen ini membuktikan bahwa LPI memandang media cetak sebagai alat perjuangan yang sangat vital. Jika dikaitkan dengan pemikiran Antonio Gramsci (1971), media cetak ini berfungsi sebagai alat untuk membentuk opini publik dan menyebarkan pengaruh di masyarakat. Melalui skema ini, LPI berhasil menyiapkan dana untuk operasional sekolah sekaligus menyediakan sarana yang kuat untuk menyebarkan gagasan pendidikan mereka.

Meskipun fokus membangun kemandirian, LPI tidak menutup diri dan tetap menuntut tanggung jawab negara. Melalui resolusi resminya, LPI turut mendesak pemerintah agar memberikan bantuan biaya atau subsidi, alat belajar, buku pedoman, serta membantu pendirian sekolah guru Islam di seluruh Indonesia (Ghazali, 1950). Sikap tegas ini sejalan dengan perjuangan Partai Masyumi yang konsisten menuntut subsidi bagi sekolah swasta Islam (Emalia, 2015: 284), serta sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran yang membuka peluang subsidi bagi sekolah swasta yang memenuhi syarat (Hidayat, 2018: 22). LPI dengan begitu menjalankan dua strategi sekaligus secara beriringan. Lembaga ini tetap menuntut pemenuhan hak dari negara untuk pendidikan Islam, tetapi di sisi lain mereka aktif membangun fondasi ekonominya sendiri di masyarakat. Prinsip dasar yang dipegang oleh LPI adalah menolak ketergantungan yang bisa mendikte arah organisasi, bukan menolak bantuan dari negara. Strategi ini mencerminkan konsep historic bloc dari pemikiran Gramsci (1971), di mana tuntutan politik kepada pemerintah diimbangi secara nyata dengan penguatan basis ekonomi dan sosial langsung di tengah-tengah masyarakat sipil.

Formasi Intelektual dan Peran KH. Noer Alie sebagai Intelektual Organik

K.H. Noer Alie lahir di Ujungmalang, Bekasi, dari keluarga petani pemilik lahan yang mengenyam pendidikan madrasah berbahasa Arab. Orang tuanya memiliki

kesadaran tinggi untuk mendorong anak mereka menuntut ilmu (Tamala dkk., 2022: 207). Waktu kelahiran tokoh ini masih menjadi perdebatan di antara para ahli sejarah antara tahun 1913 dan 1914 (Zubaidah & Aripin, 2025: 79). Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan Islam tradisional yang kuat. Pada usia delapan tahun, ia mulai belajar mengaji kepada Guru Maksum, kemudian memperdalam ilmunya kepada Guru Mughni. Di bawah bimbingan Guru Mughni, ia mempelajari kitab *alfiyah*, Al-Qur'an, tajwid, tauhid, dan fikih melalui sistem diskusi kelompok langsung atau *halaqah* (Zubaidah & Aripin, 2025: 79–80). Sejak masa ini, kepekaan sosialnya sudah terbentuk. Ia secara kritis membandingkan materi agama dari gurunya dengan penderitaan rakyat sekitar yang ditindas oleh tuan tanah dan beban pajak penjajah. Ia menyimpulkan bahwa kekacauan sosial tersebut terjadi karena minimnya pendidikan agama di masyarakat (Zubaidah & Aripin, 2025: 80). Semangat belajarnya terbukti tumbuh dari kepedulian atas kondisi sosial nyata, bukan sekadar pelestarian tradisi menghafal kitab (Zubaidah & Aripin, 2025: 80).

Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke pesantren Guru Marzuki di Klender yang setingkat aliyah (Zubaidah & Aripin, 2025: 80). Di lembaga ini, ia mempelajari tauhid, nahwu, sharaf, fikih, ushul fikih, balaghah, hadis, tafsir, mantik, faraidh, hingga ilmu falak (Zubaidah & Aripin, 2025: 80). Bagi sejarah perkembangan pemikirannya, materi ini membuktikan bahwa ilmu logika dan ilmu hitung sudah menjadi bagian dari dasar pendidikan tradisionalnya (Zubaidah & Aripin, 2025: 80). Pesantren ini juga menjadi tempatnya membangun jaringan pertemanan sesama santri yang kelak sama-sama menjadi ulama berpengaruh di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Tamala dkk., 2022: 208). Pada tahun 1933, ia dipercaya menjadi *badal* atau pengganti guru (Tamala dkk., 2022: 207), dan ia mengajar penduduk kampung yang buta huruf (Zubaidah & Aripin, 2025: 81). Saat ia bersiap berangkat ke Mekah, Guru Marzuki memberikan pesan khusus agar ia tetap berguru kepada Syekh Ali al-Maliki di sana (Zubaidah & Aripin, 2025: 81).

Selama bermukim di Mekah dari tahun 1934 hingga akhir 1930-an, ia mengenal dua model pendidikan, yakni kelas formal berjenjang ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah dengan ijazah, serta *halaqah* di serambi Masjidil Haram serta di rumah para syekh (Zubaidah & Aripin, 2025: 82). Meskipun ia sendiri lebih memilih model *halaqah* untuk belajarnya, model kelas formal berjenjang itulah yang kelak diadopsi secara nyata di pesantrennya (Zubaidah & Aripin, 2025: 82). Pengalaman ini menjadi dasar konkret bagi

rancangan kurikulum (*leerplan*) Sekolah Rakyat Islam (SRI) miliknya yang diatur berjenjang enam kelas (Zubaidah & Aripin, 2025: 82). Selama di Mekah, gurunya mengajarkan hadis, fikih, nahwu, mantik, dan bahkan ilmu politik (Zubaidah & Aripin, 2025: 82). Melalui organisasi PPPI dan Perindom, ia aktif berdiskusi mengenai nasib kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1937, ia memimpin Persatuan Pelajar Betawi yang bertujuan membantu pendanaan anggota yang kesulitan, meningkatkan intelektualitas lewat diskusi dan ceramah, serta memupuk rasa kebangsaan (Zubaidah & Aripin, 2025: 82). Pengalaman memimpin ini membuatnya terlatih mengelola wadah intelektual sebelum memimpin LPI di tanah air (Zubaidah & Aripin, 2025: 82). Sebelum pulang, Syekh Ali al-Maliki berpesan agar ia fokus mengajar dan menolak menjadi penghulu atau pegawai pemerintah (Zubaidah & Aripin, 2025: 83). Pesan ini menjadi landasan prinsip yang kuat bagi penolakannya terhadap jabatan bupati pada tahun 1949 (Zubaidah & Aripin, 2025: 83).

Sepulang dari Mekah, ia langsung mendirikan pengajian tingkat dasar dan menengah di Ujungmalang yang berhasil menjaring sekitar 300 santri pada akhir tahun 1941 (Zubaidah & Aripin, 2025: 83). Di samping mengajar, ia terjun langsung dalam perjuangan fisik melawan penjajah dengan memimpin pasukan Hizbullah, yang merupakan pasukan dari Partai Masyumi (Madinier, 2015: 55). Selama berada di Jakarta pada tahun 1949, Noer Alie tetap membina kontak dengan pemimpin utama Masyumi seperti Mohammad Natsir, Mohammad Roem, dan Yusuf Wibisono, serta aktif menggerakkan Masyumi Cabang Jatinegara (Anwar, 2015: 137). Kedekatan ini dibuktikan melalui surat keterangan bertanggal 22 September 1949 dari Mohammad Natsir, selaku anggota Delegasi Republik di Indonesia, yang menerangkan bahwa K.H. Nur Alie yang saat itu berusia 35 tahun turut membantu pelaksanaan tugas delegasi negara (Anwar, 2015: 139).

Berpegang teguh pada pesan gurunya di Mekah, Noer Alie konsisten menjaga jarak dari kekuasaan negara. Pada Agustus 1949, ia menolak tawaran Wakil Residen Jakarta untuk menjabat sebagai Bupati dengan alasan mematuhi nasihat guru dan merasa jabatan tersebut bukan bidang atau kapasitas dirinya, lalu menganjurkan Suhandan Umar, Ketua Masyumi Cabang Jatinegara, sebagai calon yang layak (Anwar, 2015: 138). Sikap independen ini sejalan dengan Anggaran Dasar Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Pasal IV yang menegaskan bahwa tentang politik, LPI ditetapkan tidak menjalankan politik praktis (Anwar, 2015: 138). Walaupun menjaga jarak dengan politik kekuasaan, LPI tetap

bersuara kritis terhadap kebijakan pemerintah melalui *Statement* resmi yang memperkuat sikap Masyumi (Anwar, 2015: 138). Noer Alie dan LPI memosisikan diri sebagai bagian dari masyarakat sipil yang kritis terhadap aparatus negara dan politik praktis (Anwar, 2015: 138). Pada saat yang sama ia mampu menunjuk calon dari jaringan partainya, sehingga pengaruhnya tetap mengalir ke dalam pemerintahan tanpa dirinya harus menjadi bagian struktural dari kekuasaan tersebut (Anwar, 2015: 138). Kedekatan ini menjelaskan mengapa gagasan pendidikannya selaras dengan Partai Masyumi, yang menghendaki adanya keseimbangan antara ilmu agama dan pengajaran yang menumbuhkan keterampilan di samping pengetahuan (Emalia, 2015: 284).

Peran kepemimpinan K.H. Noer Alie meluas secara nasional melalui Konferensi I LPI pada tanggal 11-14 Mei 1950 di Jakarta yang memilih dirinya sebagai Ketua Umum LPI Pusat dan K.H.M. Rodji'un sebagai Ketua I (Ghazali, 1950). Laporan mencatat bahwa Rodji'un, yang sebelumnya menjabat Ketua Umum, tidak dapat mengikuti konferensi karena mengalami sakit cukup berat (Ghazali, 1950). Susunan pengurus lainnya terdiri atas Hasjibuan (Sekretaris Umum), Abdullah Sja'ir (Sekretaris I), Mughni Nawawi dan Murtadho Ahmad (Bendahari), Joesdi Ghazali dan Nur Hasan (Bagian Penerangan), serta M. Junus dan Hasjibuan (Bagian Ekonomi) (Ghazali, 1950). Pada masa pendirian, K.H. Noer Alie memegang urusan ke dalam sedangkan Roji'un mengurus hubungan keluar (Anwar, 2015: 138). Namun berdasarkan Anggaran Dasar Pasal IX, posisi Ketua Dewan Pimpinan menetapkan bahwa ia adalah pemimpin umum yang mewakili lembaga ke luar (Anwar, 2015: 138). Perpindahan posisi itu secara nyata menunjukkan adanya perluasan peran K.H. Noer Alie (Anwar, 2015: 138).

Struktur organisasi yang dirancang oleh konferensi ini mencerminkan pembagian kerja intelektual yang sangat rapi (Ghazali, 1950). Gagasan kurikuler dan fatwa berada pada Majelis Islah yang terdiri atas alim ulama dan cerdik pandai, dengan Badan Pekerja yang wajib menyusun *leerplan* bertingkat tinggi dan pedoman penerangan (Ghazali, 1950). Bagian Penerangan bertanggung jawab mengelola media, sedangkan Bagian Ekonomi bertugas mengurus usaha organisasi (Ghazali, 1950). Model kepemimpinan K.H. Noer Alie bersifat kolektif; ia memimpin kerja bersama dan tidak menulis sendiri seluruh dokumen organisasi (Ghazali, 1950). Dokumen resmi yang ada pun tidak menyebut secara spesifik siapa sosok tunggal penyusun *leerplan* SRI (Ghazali, 1950). Oleh karena itu, klaim bahwa ia “merumuskan” strategi kurikulum harus dibaca sebagai bentuk kepemimpinan organisatoris atas pembagian kerja tersebut (Ghazali, 1950).

Pembacaan ini sejalan dengan pandangan Gramsci (1971) mengenai "intelektual organik", yaitu melihat pemikir terutama sebagai organisator dan pemimpin gerakan di masyarakat, bukan sekadar penulis gagasan di atas kertas.

Rencana pelajaran atau *leerplan* LPI tahun 1950 ini menjadi dasar utama dalam rancangan praktik pendidikan SRI di Ujungmalang pada dekade 1950-an. Rekam jejak K.H. Noer Alie dalam merancang kurikulum ini terbukti secara konkrit melalui literatur biografis yang mencatat modul materi keagamaan yang ia susun sendiri untuk SRI dan Pesantren Bahagia, yakni modul akhlak, tauhid, fikih, sharaf, dan nahwu pada tingkat ibtidaiyah, serta kitab *Nur al-Hidayah*, *Nibras al-'Uqul*, dan hadis pada tingkat menengah (Zubaidah & Aripin, 2025: 84–85). Catatan sejarah menyebutkan bahwa SRI Ujungmalang memakai mata pelajaran umum dari pemerintah, namun khusus materi agamanya murni menggunakan modul susunannya sendiri (Zubaidah & Aripin, 2025: 84–85). Sebaliknya, Cipta dkk. (2022: 49–50) menyebut bahwa kurikulum SRI sepenuhnya berasal dari pemerintah. Perbedaan data ini menunjukkan adanya kehati-hatian bahwa rancangan tahun 1950 boleh jadi menempuh jalur lain dalam praktiknya, dan tahun pasti penyusunan modul-modul tersebut pun belum diketahui (Cipta dkk., 2022: 49–50). Melalui pemetaan tersebut, kesejajaran paling kokoh berada pada rumpun keagamaan yang terdokumentasi langsung melalui modul karya Noer Alie, sedangkan metode pengajaran dan beban belajarnya dipertegas melalui filosofi pendidikannya pada tahun 1980-an (Zubaidah & Aripin, 2025: 90–91). Filosofi tersebut membedakan secara tegas antara pengajaran (*ta'lim*) yang melahirkan manusia pintar, dengan pendidikan (*tarbiyah*) yang melahirkan manusia benar, serta memegang prinsip bahwa kepintaran tanpa kesalehan sangat berbahaya bagi masyarakat (Zubaidah & Aripin, 2025: 90–91).

Dalam kerangka itu, integrasi antara ilmu agama dan pengetahuan umum pada *leerplan* murni lahir dari akar internal dan bukan karena pengaruh pendidikan Barat, sebab sumber sejarah yang ada tidak mencatat adanya riwayat pendidikan Barat pada Noer Alie (Zubaidah & Aripin, 2025: 90–91). Penggabungan ilmu ini didasari oleh hasil empat faktor utama: keberadaan ilmu rasional dalam kurikulum pesantren Guru Marzuki, pengalaman nyata dalam pergerakan sosial-politik dan keorganisasian, jaringan Partai Masyumi yang menghendaki pendidikan berimbang antara agama dan keterampilan (Emalia, 2015: 284), serta tuntutan memenuhi standar sekolah nasional tahun 1950 (Emalia, 2015: 284). Jalur Masyumi ini merupakan bentuk kesejajaran gagasan, namun keterkaitannya terlihat dari isi *leerplan* SRI yang memuat pelajaran Menggambar,

Pekerdjaan Tangan, serta Gerak Badan yang diisi dengan kegiatan praktis bekerja di kebun yang dibuat sendiri (Ghazali, 1950). Bagi tesis sejarah, gambaran yang muncul ialah sosok ulama tradisional yang berpikiran terbuka secara praktis, di mana arah intelektual *leerplan* SRI selaras dengan gagasan dan kepemimpinannya sebagai sebuah karya kolektif yang ia pimpin dan arahkan langsung, bukan dokumen yang sekadar ia sahkan sebagai formalitas ketua (Ghazali, 1950).

Keberhasilan gerakan K.H. Noer Alie didorong penuh oleh jaringannya yang terbentang luas ke beberapa arah (Ghazali, 1950). Ke dalam jaringan ulama Betawi, Noer Alie tercatat sebagai murid Guru Marzuki di Jatinegara (Derani, 2013: 235) dan termasuk sekitar empat puluh satu ulama Betawi terpandang yang berguru kepadanya (Dzikara, 2024: 27). Penempatan Majelis Islah dalam kepengurusan menunjukkan kesadarannya yang tinggi bahwa konsolidasi umat harus mampu melewati sekat-sekat perbedaan politik antarulama (Dzikara, 2024: 27). Jaringan kedua mengarah ke organisasi pendidikan dan ulama lintas wilayah, di mana dokumen Resolusi LPI dikirim secara resmi kepada Menteri Agama RIS dan RI, Menteri PP dan K, Dewan Pimpinan Masyumi Jakarta, pengurus besar Persatuan Guru Islam Indonesia di Bandung, Ponorogo, Samarinda, Kotaradja, dan Bukittinggi, Balai Pendidikan Islam Cirebon, Lembaga Pendidikan Muslimin Bandung, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan organisasi Islam lainnya (Ghazali, 1950: 31). Anggaran Dasar LPI bahkan memfasilitasi perluasan ini dengan menetapkan pembentukan daerah cabang pada tiap kabupaten serta membuka status keanggotaan istimewa bagi panitia masjid, organisasi, serta pengurus madrasah, sekolah, dan pesantren berdasarkan Pasal V dan XI (Ghazali, 1950).

Setelah tahun 1950, kiprah perjuangannya terus berkembang di dua jalur utama. Di ranah politik, ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Masyumi Jawa Barat dan terpilih menjadi anggota Dewan Konstituante, serta di ranah pendidikan mengembangkan wilayah Bekasi melalui pesantren, madrasah tsanawiyah, dan sekolah persiapan madrasah menengah Attaqwa (Syamsuri, 2023: 126–128). Maka dari itu, Noer Alie tampil bukan sekadar pengelola sekolah biasa (Syamsuri, 2023: 126–128). Ia memimpin perumusan gagasan melalui *leerplan* dan Majelis Islah, menyusun basis ekonomi melalui N.V. dan penerbitan, serta menghubungkan keduanya secara kokoh dengan jaringan ulama dan partai (Syamsuri, 2023: 126–128). Kerja ketiganya secara nyata menunjukkan fungsi dari intelektual organik yang berhasil mengonsolidasikan gagasan, lembaga, dan basis

material dalam satu kesatuan gerakan yang utuh atau *historic bloc* sebagaimana digambarkan oleh Gramsci (1971).

KESIMPULAN

Respons terhadap pemberlakuan UUPP No. 4 Tahun 1950 bukan sekadar reaksi kelembagaan dari LPI, melainkan sebuah artikulasi utuh dari buah pikiran dan cetak biru perjuangan intelektual K.H. Noer Alie. LPI dan jaringan Sekolah Rakyat Islam enam tahun terbukti berfungsi sebagai wadah taktis serta kendaraan perjuangan yang sengaja dibentuk oleh K.H. Noer Alie untuk mengaplikasikan gagasan pendidikannya yang mandiri dan integratif di tengah masyarakat sipil. Aktualisasi olah pikir tersebut terejawantah secara nyata melalui pilar kurikuler dan pilar ekonomi secara beriringan.

Pada pilar kurikuler melalui *leerplan* Sekolah Rakyat Islam, kurikulum ini menjadi ruang akomodasi yang merefleksikan latar belakang intelektual tradisional K.H. Noer Alie. Ia memadukan standar Sekolah Rakyat nasional dengan rumpun keagamaan dan penguasaan bahasa seperti Arab dan Inggris, yang secara substansial diperkuat oleh modul-modul keagamaan susunan pemikiran pribadinya. Kurikulum yang padat namun berimbang ini digerakkan oleh visi filosofisnya yang membedakan secara tegas antara pengajaran atau *ta'lim* yang sekadar mengejar kepintaran kognitif, dengan pendidikan atau tarbiyah yang melahirkan manusia benar dan saleh secara sosial.

Sementara itu pada pilar ekonomi, strategi pembentukan perusahaan saham N.V. dengan kepemilikan terbatas, pemisahan anggaran *Majelis Islah* lewat *Baitul Mal*, serta pemusatan dana media penerbitan merupakan perwujudan langsung dari prinsip independensi intelektual K.H. Noer Alie. Langkah ini merefleksikan kepatuhannya pada pesan moral gurunya di Mekah untuk menjaga jarak dari aparatus negara. Ia memilih membangun basis ekonomi otonom di tengah masyarakat sipil guna menuntut tanggung jawab negara terkait hak subsidi pendidikan, sekaligus menghindari ketergantungan yang dapat mendikte arah perjuangan pendidikan Islam.

Secara teoretis dalam kerangka Antonio Gramsci, K.H. Noer Alie telah menjalankan fungsi nyata sebagai intelektual organik yang paripurna. Ia tidak bertindak sebagai pemikir menara gading yang sekadar menulis teori, melainkan seorang arsitek pergerakan yang mampu menyatukan suprastruktur gagasan lewat leerplan dan basis material lewat perusahaan saham serta media ke dalam satu kesatuan gerakan yang utuh atau *historic bloc*. Secara historiografis, kajian ini menegaskan bahwa dinamika

hubungan antara agama, negara, dan pendidikan pada awal Demokrasi Liberal di tingkat lokal tidak bersifat hitam-putih. Melalui sosok K.H. Noer Alie, terlihat bagaimana seorang ulama tradisional mampu bersikap terbuka dan pragmatis dengan memanfaatkan celah kebijakan negara sambil tetap kokoh membangun benteng pertahanan intelektualnya sendiri demi menjaga otonomi nilai keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, A. (2015). *Kemandirian ulama pejuang KH. Noer Alie*. Bekasi: Yayasan Attaqwa.

Cipta, S. E., Darmawan, W., & Kanumoyoso, B. (2022). Dari Oejoeng Malang menuju Ujung Harapan: K. H. Noer Alie sebagai ulama sekaligus pendidik dalam sejarah pendidikan di Bekasi. *Wiksa: Prosiding Pendidikan Sejarah Universitas Indraprasta PGRI* (hlm. 42–59). Jakarta: Universitas Indraprasta PGRI.

Derani, S. (2013). Ulama Betawi perspektif sejarah. *Al-Turāṡ*, *19*(2), 217–240.

Dzikara, M. (2024). Pengaruh Tharīqah Alawiyyah dalam proses islamisasi di Betawi abad 19–20 M. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, *10*(1), 18–33. https://doi.org/10.15408/ushuluna.v10i01.39415

Emalia, I. (2015). Usaha Mochammad Natsir di bidang pendidikan dalam memajukan ummat Islam Indonesia 1950–1960. *Al-Turāṡ*, *21*(2), 283–294.

Ghazali, J. (1950). *Buku laporan Konperensi Pertama Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Jakarta, 11–14 Mei 1950*. Jakarta: Pengurus Besar LPI.

Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Eds. & Trans.). New York: International Publishers.

Hidayat, A. (2018). Dinamika pembentukan Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran pertama dan penerapannya di Indonesia (1950–1954). *Prosiding Seminar Dosen Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNINDRA* (hlm. 12–30). Jakarta: Universitas Indraprasta PGRI.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 953.

Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Madinier, R. (2015). *Islam and politics in Indonesia: The Masyumi Party between democracy and integralism* (J. Desmond, Trans.). Singapore: NUS Press.

Maksum. (1999). *Madrasah: Sejarah dan perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Nasution, A. H. (2020). Rencana Pelajaran (Leer Plan) 1947 dan kebijakan publik di bidang pendidikan pasca kemerdekaan 1945–1950. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, *12*(2), 516–526. https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i2.20156

Prabowo, G., & Zulkarnain. (2016). Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 Tahun 1950 bagi pendidikan di Indonesia 1945–1954. *Risalah*. https://journal.student.uny.ac.id/risalah/article/download/3896/3539

Republik Indonesia. (1950). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah*.

Steenbrink, K. A. (1986). *Pesantren, madrasah, sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun moderen*. Jakarta: LP3ES.

Surjo, S. (1986). *Revolusi sosial di Jawa Timur 1945–1949: Dinamika politik ulama dan pesantren*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Syamsuri. (2023). Kontribusi K.H. Noer Alie dalam bela agama negara, politik, dakwah, dan pendidikan Islam Bekasi (era 1940–1992). *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, *22*(1), 124–132.

Tamala, N. F., Silaban, A., Simanjorang, B. J., & Rambe, T. (2022). Berjuang untuk agama dan bangsa: Biografi Kiai Haji Noer Ali, 1914–1992. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, *6*(2), 205–210. https://doi.org/10.30743/mkd.v6i2.5238

Zubaidah, D., & Aripin, S. (2025). Pemikiran pendidikan KH. Noer Alie. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran*, *7*(1), 78–92. https://journalversa.com/s/index.php/jipp/article/download/493/817